



Buntut 15 Siswa Dicabuli, Seleksi Guru Honorer Kota Yogya Diperketat

-Pj Walikota minta pelaku kekerasan seksual dihukum berat

YOGYA (MERAPI) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk menyeleksi tenaga guru honorer sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dialami 15 siswa di salah satu SD swasta Kota Yogya.

Pasalnya, beberapa kasus kekerasan seksual yang diterima KPAID di lingkungan sekolah mayoritas pelakunya dari guru honorer.

"Kasus kekerasan hampir semua dilakukan oleh guru-guru non PNS atau non ASN. Kalau ASN saringannya sudah bagus, nah ini harus dibentuk sistem seperti itu. Nanti ada kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dindikpora," jelas Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani, * **Bersambung ke halaman 9**



Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani (tengah) saat jumpa pers di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Kamis (11/1).

Buntut

Sambungan halaman 1

Kamis (11/1).

Dijelaskan, terkait kasus yang telah dilaporkan ke Polresta Yogyakarta Senin (8/1) itu, dari pendalaman yang telah dilakukan baru 1 anak yang terbukti mengalami kekerasan seksual dan dilanjutkan sebagai tindak pidana. Saat ini, kata Sylvi, kepolisian tengah mendalami kasus dan melakukan BAP di sekolah untuk menggali informasi dari para siswa dengan metode ramah anak.

"Semua laporan hari Senin, 15 anak itu didalami dan baru 1 yang bisa dilanjutkan karena yang lain ternyata tidak kuat (buktinya)," terangnya.

Ia mengatakan dalam melakukan penanganan psikologis terhadap anak-anak turut dilakukan DP3AP2KB. Sedangkan untuk pendampingan hukum pihaknya berkomitmen akan mengawal kasus ini dengan UPT PPA dan pihak lain.

"Jangan khawatir, kita menempatkan kasus ini sebagai priority dan tidak pernah ti-

dak menyelesaikan," katanya.

Sementara itu Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan akan melakukan upaya-upaya termasuk pendampingan terhadap korban agar dampak yang timbul tidak signifikan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kepolisian agar dalam menangani kasus ini harus dengan strategi khusus yang tentunya dengan pendekatan ramah anak.

"Kasus yang menyangkut anak-anak sensitif sekali, jangan sampai mereka trauma berkepanjangan. Makanya penanganannya pun harus soft, dengan strategi-strategi yang halus," ujarnya.

"Kami tentunya sangat menghormati proses hukum yang masih berjalan. Yang salah harus dihukum seberat-beratnya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 15 siswa di salah satu SD swasta di Yogyakarta mengalami pelecehan seksual dari guru mereka sendiri. Kasus itu dila-

porkan ke Polresta Yogyakarta, Senin (8/1).

Kuasa hukum pihak pelapor, Elna Febi Astuti menjelaskan bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi sejak Agustus hingga Oktober 2023. NB melakukan pelecehan dengan cara memegang kemaluan siswa.

Pelaku ini juga menempelkan pisau ke leher korban, pelaku mengajak korban menonton adegan film dewasa, hingga mengajari cara open booking out (BO) atau memesan layanan seks melalui sebuah aplikasi.

"Ada anak yang pahanya dipegang, diajak nonton video dewasa, diajari memesan open BO via aplikasi," ujar Elna.

Akibat kejadian itu, psikologis anak hingga guru, termasuk kepala sekolah SD yang anaknya sendiri terganggu. Pemulihan kondisi psikologis para korban saat ini dibantu oleh Rifka Annisa Women Crisis Centre.

(C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005